



LAPORAN KINERJA (LKj)

TAHUN 2023



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas izin-Nya Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 selesai disusun sesuai yang direncanakan. Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan Visi, Misi, dan Pencapaian Sasaran Strategis terhadap Indikator Kinerja Utama yang telah menjadi kontrak kinerja antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Bupati Bengkulu Selatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023.

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan disusun berdasarkan pada instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan Akuntabilitas serta pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan. Komitmen dalam penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan memperlihatkan kinerja yang sangat baik. Hal ini terlihat dari 5 indikator kegiatan yang menjadi tolok ukur kinerja Dinas Ketahanan Pangan memperlihatkan hasil yang sangat baik.

Namun demikian, masih dirasa perlu dilakukan perbaikan guna penyempurnaan di masa mendatang. Berkenaan dengan itu, Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 ini dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Manna, Januari 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan

II. SUSMANTO, MM

NIP. 19680814 200212 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan LKj	4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan LKj	4
1.4. Gambaran Umum PD	7
A. SOTK	7
B. Isu Strategis PD	14
C. Keadaan Pegawai	19
D. Keadaan Sarana dan Prasarana	23
E. Keuangan	25
1.5. Sistematika LKj	27
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	29
A. Visi dan Misi Kepala Daerah	29
B. Tujuan dan Sasaran PD	32
C. Strategi dan Arah Kebijakan	35
2.2. Perjanjian Kinerja	36
2.3. Rencana Anggaran PD	38
A. Target Belanja	38
B. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama PD	46
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	52
3.3. Realisasi Anggaran	83
3.4. Inovasi Perangkat Daerah	85
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	87
4.2 Rekomendasi	91
Lampiran :	
1) Perjanjian Kinerja	
2) Lain-lain yang dianggap perlu	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja tahun awal perencanaan dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good government).

Seiring dengan upaya merealisasikan good government, Dinas Ketahanan Pangan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program , mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah tertuang dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022-2026. Pembangunan ketahanan pangan secara menyeluruh akan dapat terlaksana dengan efektif manakala memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan harus terpadu, terukur keberhasilannya dan berkesinambungan. Dengan demikian setiap pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan dapat diarahkan dengan benar, dapat dipantau perkembangannya dan selanjutnya dapat dievaluasi keberhasilannya. Dari target kinerja program/kegiatan dan sasaran yang dituangkan dalam penetapan kinerja setiap akhir tahun anggaran akan dievaluasi capaian kinerjanya sesuai indikator yang telah ditetapkan.

Pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2023 menunjukkan hasil yang menggembirakan hal ini dibuktikan dengan hampir tercapainya semua target indikator kinerja kegiatan dan sasaran. Namun demikian, pada beberapa aspek perlu pembenahan lebih lanjut agar pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai secara maksimal. Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan melalui rencana strategis yang telah ditetapkan dengan tingkat capaiannya dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Terlaksananya penanganan desa rentan rawan pangan melalui kegiatan pembagian bibit nangka mini sebanyak 532 batang. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September 2023 di 6 Desa antara lain: Ds. Lubuk Ladung Kec. Kedurang Ilir, Ds. Sukarami Kec. Kedurang Ilir, Ds. Karang Caya Kec. Kedurang Ilir, Ds. Sukananti Kec. Kedurang, Ds. Nanti Agung Kec. Kedurang, Ds. Rantau Sialang Kec. Kedurang.
2. Berdasarkan Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan Bengkulu Selatan tahun 2023 (data 2022) total energy perkapita perhari sebesar 3.311 kkal/kap/hari, ketersediaan protein sebesar 110,66 gram/kap/hari, dengan tingkat ketersediaan energy tahun 2023 adalah 137,95% dan tingkat ketersediaan protein sebesar 175,65%. Sehingga didapatkan Skor PPH Ketersediaan sebesar 93,16 dengan Angka Kecukupan Energi sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein sebesar 63 gram/kap/hari.
3. Data Identifikasi pangan lokal di tiap kecamatan pada tahun 2023 antara lain : di Kecamatan Manna jumlah produksi/thn terbesar adalah ubi kayu sebesar 200 ton dengan luas lahan 15 Ha, di Kecamatan Kota Manna dan Pasar Manna jumlah produksi/thn terbesar adalah pisang sebesar 40 ton dengan luas lahan 7,5 Ha, di Kecamatan Kedurang jumlah produksi/thn terbesar adalah ubi kayu yaitu sebesar 60 ton dengan luas lahan 4 Ha, di Kecamatan Bunga Mas jumlah produksi/thn terbesar adalah jagung yaitu sebesar 600 ton dengan luas lahan 672 Ha, di Kecamatan Kedurang Ilir jumlah produksi/thn terbesar adalah Jagung Manis yaitu sebesar 2 ton dengan luas lahan 2 Ha, di Kecamatan Seginim jumlah produksi/thn terbesar adalah pisang sebesar 73 ton dengan luas lahan 9 Ha, di Kecamatan Air Nipis jumlah produksi/thn terbesar yaitu ubi kayu sebesar 312 ton dengan luas lahan 12 Ha, di Kecamatan Pino jumlah produksi/thn terbesar adalah pisang sebesar 86 ton dengan luas lahan 43 Ha, di Kecamatan Pino Raya jumlah produksi/thn terbesar adalah ubi kayu yaitu sebesar 10 ton dengan luas lahan sebanyak 200 Ha, di Kecamatan Ulu Manna jumlah produksi/thn terbesar adalah jagung yaitu sebesar 618 ton dengan luas lahan 273 Ha.

4. Dinas Ketahanan Pangan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan pekarangan melalui pembagian bibit untuk kegiatan P2KP pada Bulan Mei s/d Desember Tahun 2023. Bibit tersebut disalurkan di 7 desa yaitu (1) KWT Makmur Sehati Ds. Pagar Gading Kec. Pino Raya, (2) KWT Melati Ds. Pagar Banyu Kec. Kedurang Ilir, (3) KWT Cempaka Putih Ds. Air Sulau Kec. Kedurang Ilir, (4) KWT Mawar Merah Ds. Padang Burnai Kec. Bunga Mas, (5) KWT Anggrek Ds. Tanjung Eran Kec. Pino, (6) KWT Harapan Kita Ds. Padang Mumpo Kec. Pino, serta (7) KWT Taman Indah Kelurahan Gunung Ayu Kec. Kota Manna. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan pembinaan kelompok penerima manfaat kegiatan Urban Farming (Pertanian Perkotaan) pada bulan September s/d Desember 2023 di 2 Kelurahan yaitu KWT Tomat Kelurahan Padang Kapuk Kec. Kota Manna dan KWT Harapan Maju Kelurahan Gunung Mesir Kec. Pasar Manna.
5. Berdasarkan data analisa konsumsi pangan Tahun 2023, total konsumsi energy aktual sebesar 2.074 kkal/kap/hr, dengan Angka Kecukupan Energi sebesar 2.100 kkal/kap/hari dan didapatkan Skor PPH konsumsi sebesar 89,2.
6. Pengawasan keamanan pangan segar dilakukan dengan menggunakan rapid test kit untuk mengetahui kandungan pestisida dan formalin pada sample yang diuji. Pengawasan tersebut dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada bulan April di Pasar Kutau Kec. Kota Manna, pada bulan Agustus di Pasar Ampera Kec. Pasar Manna, pada bulan Oktober di Pasar Kayu Kunyit Kec. Manna. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dilaksanakan terhadap produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan organik, baik di tingkat budidaya, penerapan maupun yang beredar di pasar. Pada pengawasan 1, jenis sample yang digunakan seperti Cabe, Tomat, Brokoli, Anggur dan Mangga Indramayu. Hasil pengujian pada pengawasan ke-1, didapatkan hasil bahwa anggur tidak aman dikonsumsi karena positif mengandung formalin. Pada pengawasan ke-2, jenis sample yang digunakan seperti Cabe, Brokoli, Bunga Kol, Tomat, Bawang Daun, Anggur dan Pir.

7. Hasil pengujian pada pengawasan ke-2, didapatkan hasil bahwa Cabe asal Seginim, Bunga Kol asal Curup, dan Tomat asal Pagaralam tidak aman dikonsumsi karena positif mengandung pestisida. Pada pengawasan ke-3, jenis sample yang digunakan seperti Kubis, Mangga Indramayu, Pir, Cabe, dan Tomat. Hasil pengujian pada pengawasan ke-3, didapatkan hasil bahwa Cabe Seginim tidak aman dikonsumsi karena positif mengandung pestisida.
8. Pada tahun 2023 telah dilakukan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu beras sebanyak 5.000 kg melalui alokasi dana APBD Kabupaten Bengkulu Selatan. Stock awal cadangan pangan pemerintah daerah diawal tahun 2023 yaitu 6.178,07 kg. Selama tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan cadangan pangan pemerintah (beras) sebanyak 5.017,6 kg, sehingga stock akhir cadangan pangan pemerintah daerah (beras) tahun 2023 yaitu sebanyak 6.160,47 kg.
9. Untuk kegiatan pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia, dilakukan sosialisasi penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) di 4 gapoktan yaitu Gapoktan Empat Serangkai Ds. Melao Kec. Manna, Gapoktan Tiga Serangkai Ds. Pajar Bulan Kec. Kedurang, Gapoktan Sejahtera Ds. Beringin Datar Kec. Pino dan Gapoktan Bukit Barisan Ds. Sukarami Kec. Air Nipis. Selanjutnya dilakukan pembinaan dan pendampingan LDPM dan TTI di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada Tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan pengendalian inflasi melalui pengadaan cadangan pangan (beras) sebanyak 35 ton. Beras cadangan pangan tersebut akan dibagikan di tahun 2024, dan sisanya akan menjadi stok cadangan pangan pemerintah.
10. Pengamatan harga yang diamati yaitu harga produsen dan harga pedagang (pedagang grosir dan pedagang eceran). Pengamatan diamati dan diupdate setiap hari mulai bulan Januari s/d Desember 2023.

Komoditas pemantauan harga pangan tersebut antara lain : Beras premium, Beras medium (kg), Kedelai biji kering (impor) (kg), Bawang merah (kg), Bawang putih bonggol (kg), Cabe merah keriting (kg), Cabe rawit merah (kg), Daging ayam ras (kg), Daging sapi murni (kg), Telur ayam ras (kg), Gula konsumsi (kg), Minyak goreng kemasan (kg), Tepung terigu (curah) (kg), Ikan tongkol (kg), Garam halus beryodium (kg), Tepung terigu kemasan (kg).

Dari hasil analisis kinerja Dinas Ketahanan pangan Tahun 2023, Kinerja dan Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 **Baik** dengan realisasi capaian kinerja terhadap Renstra SKPD sebesar 94,69% dan Realisasi Anggaran sebesar 93,01%. Namun demikian, pada beberapa aspek perlu dilakukan pembenahan lebih lanjut agar pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai secara maksimal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu program Kementerian Pertanian yang sedang digalakkan adalah mewujudkan kedaulatan pangan, melalui program utama yaitu Swasembada Pangan yang didukung dengan program lainnya. Untuk menuju kedaulatan pangan, ketahanan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena pemenuhan pangan merupakan hak asasi setiap manusia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang merumuskan ketahanan pangan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau” dan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan, ada 3 komponen pokok yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Ketersediaan pangan yang cukup dan merata
2. Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien
3. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal.

Upaya memantapkan ketahanan pangan yang dilandasi kemandirian pangan, masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain :

1. Pendapatan masyarakat yang masih rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum, sehingga menurunnya daya beli masyarakat.
2. Teknologi pengolahan pangan lokal masih kurang.

3. Promosi penganekaragaman konsumsi pangan masih kurang.
4. Masih berkembangnya konsep makan “ *belum makan, kalau belum makan nasi*”.
5. Pemanfaatan dan produksi sumber pangan lokal seperti aneka umbi, jagung dan sagu masih rendah.
6. Perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi produksi pangan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Hal ini terutama berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu akuntabilitas kinerja merupakan alat ukur dalam melihat kesejahteraan masyarakat karena didalamnya terlihat keberhasilan dan kegagalan dalam misi organisasi. Dalam upaya mengimplementasikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi secara berjenjang dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Dinas Ketahanan Pangan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2007). Dimana tugas pokok, fungsi dan Tata Kerjanya diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 25 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu

Selatan Nomor 27 Tahun 2011). Dinas Ketahanan pangan didirikan dengan tujuan mewujudkan ketahanan pangan modern, efisien, efektif dan berkesinambungan dalam menggerakkan ekonomi nasional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyusunan rencana strategis (RENSTRA) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Ketahanan Pangan serta pengelolaan sistem informasi;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan ketahanan pangan, kefarmasian, alat ketahanan pangan dan PKRT serta sumber daya ketahanan pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang ketahanan pangan;
- f. Pembinaan pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP);

- g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dibawah koordinasi dinas;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

1.2 Tujuan Penyusunan LKj

Laporan Kinerja tahun 2022 disusun guna mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan selama Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan ataupun kegagalan Dinas Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan Tugas dan fungsinya, yang merupakan implementasi dari misi Dinas Ketahanan Pangan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan LKj

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan

- Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotrapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja

- Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran

Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.4 Gambaran Umum PD

A. SOTK

Struktur Organisasi Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas

➤ Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan fungsi Pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

➤ Fungsi

- 1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 2) Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Ketahanan Pangan serta pengelolaan system informasi;

- 3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Ketahanan Pangan, kefarmasian, alat Ketahanan Pangan dan PKRT serta sumber daya Ketahanan Pangan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang Ketahanan Pangan;
- 6) Pembinaan pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- 7) Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana teknis dibawah koordinasi dinas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. Unsur Sekretariat yaitu : Sekretaris

➤ Tugas Pokok

Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan dinas.

➤ Fungsi

- 1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta anggaran Dinas Ketahanan Pangan;
- 2) Pengelolaan data dan informasi di bidang Ketahanan Pangan;
- 3) Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama

dibidang Ketahanan Pangan;

- 4) Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi dinas;
- 5) Pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;
- 6) Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas;
- 7) Koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- 8) Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
- 9) Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat di bidang Ketahanan Pangan;
- 10) Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang ketahanan pangan;
- 11) Penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan; dan
- 12) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pelaksanaan teknis dan operasional fungsi kesekretariatan dijalankan oleh :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Kelompok Substansi Perencanaan dan Keuangan

3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

➤ Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Dinas di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

➤ Fungsi

- 1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- 2) Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- 3) Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- 4) Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- 5) Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta

penanganan kerawanan pangan

- 6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan meliputi :

1. Kelompok Substansi Ketersediaan Pangan;
2. Kelompok Substansi Sumber Daya Pangan;
3. Kelompok Substansi Kerawanan Pangan.

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

➤ Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Dinas dibidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

➤ Fungsi

- 1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan;
- 2) Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi dan keamanan pangan, pengawasan keamanan

- pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- 3) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - 4) Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - 5) Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi dan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - 6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok substansi yaitu :

1. Kelompok Substansi Konsumsi Pangan;
 2. Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 3. Kelompok Substansi Keamanan Pangan.
5. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
 - Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam

menyelenggarakan sebagian fungsi dinas di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

➤ Fungsi

- 1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- 2) Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- 3) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- 4) Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- 5) Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- 6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang meliputi :

1. Kelompok Substansi Distribusi Pangan;
2. Kelompok Substansi Harga Pangan;
3. Kelompok Substansi Cadangan Pangan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.

Struktur organisasi PD terlampir.

B. Isu Strategis PD

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Bengkulu Selatan, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Regulasi

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan UU No. 18 Tahun 2012 berkonsekuensi pada regulasi turunan untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan sesuai yang diamanatkan pada Pemerintah Kabupaten. Dengan demikian, upaya pemantapan Ketahanan Pangan yang

berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan dapat diwujudkan. Perwujudan ketahanan pangan tersebut ditandai dengan tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Ketidadaan regulasi turunan dapat menghambat gerak langkah penyelenggaraan urusan pangan di tingkat Kabupaten.

2. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan

Isu produksi dan ketersediaan pangan perlu mendapatkan perhatian. Walaupun produksi pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan secara umum mengalami pertumbuhan positif namun belum semua pangan tersedia secara cukup dari hasil produksi Kabupaten Bengkulu Selatan. Isu produksi pangan semakin menarik perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksinya, luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada.

3. Penguatan Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

4. Peningkatan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan

Isu informasi harga, pasokan dan akses pangan diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan.

5. Penanganan Kerawanan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan masih relatif tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah daerah.

Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara

penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan penanganan kerawanan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

6. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih relatif rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor.

7. Peningkatan Keamanan Pangan Segar

Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sangsi

yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

8. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Isu ini stabilitas pasokan, harga pangan dan distribusi penting karena : (1) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin

banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

C. Keadaan Pegawai

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*human resources*) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2022-2026.

Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan 31 Desember 2023, tercatat sebanyak 20 orang. Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jenis kelamin, dan pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan. Adapun rincian komposisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan dimaksud sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu

Selatan Berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tabel 1 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Bengkulu Selatan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Bidang	Pendidikan (Orang)							Total (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	S-3	
1	Sekretariat	-	-	1	-	5	1	-	7
2	Ketersedian dan Kerawanan Pangan	-	-	-	-	5	-	-	5
3	Konsumsi dan Keamanan Pangan	-	-	-	-	2	2	-	4
4	Distribusi dan Harga Pangan	-	-	-	-	3	1	-	4
Jumlah (Orang)		-	-	1	-	15	4	-	20
Persentase (%)		-	-	5	-	75	20	-	100

Berdasarkan Tabel 1 di atas, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan adalah SLTA sebanyak 1 orang atau 5% dari jumlah total pegawai Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 20 orang dan tingkat pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) sebanyak 4 orang atau 20% dari jumlah total pegawai Dinas Ketahanan Pangan, sebagian besar pegawai Dinas Ketahanan Pangan berpendidikan (S1) yaitu sebanyak 15 orang atau mencapai 75% dari jumlah total pegawai.

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Bengkulu Selatan berdasarkan jenis kelamin

No	Bidang	Jenis Kelamin (Orang)		Total
		Laki-laki	Perempuan	(Orang)
1	Sekretariat	4	3	7
2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	2	3	5
3	Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	3	4
4	Distribusi dan Harga Pangan	1	3	4
Jumlah (Orang)		8	12	20
Persentase (%)		40	60	100

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8 orang (40%) dan pegawai yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 12 orang atau (60%).

c. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan terbanyak adalah pegawai golongan (III) yaitu sebanyak 17 orang atau 80,95% dari jumlah total pegawai Dinas Ketahanan Pangan, sedangkan golongan tertinggi golongan (IV) sebanyak 4 Orang atau 19,05% dari jumlah total pegawai Dinas Ketahanan Pangan.

Secara lengkap komposisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3
Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Golongan

No	Bidang	Golongan (Orang)				Total (Orang)
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	-	5	2	7
2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	-	-	5	-	5
3	Konsumsi dan Keamanan Pangan	-	-	2	2	4
4	Distribusi dan Harga Pangan	-	-	3	1	4
Jumlah (Orang)		-	-	15	5	20
Persentase (%)		-	-	75	25	100

d. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan

Komposisi pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4
Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan

No	Bidang	Pendidikan Penjenjangan (Orang)				Total (Orang)
		PIM-I	PIM-II	PIM-III	PIM-IV	
1	Sekretariat	-	1	1	1	3
2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	-	-	-	-	-
3	Konsumsi dan Keamanan Pangan	-	-	-	1	1
4	Distribusi dan Harga Pangan	-	-	-	1	1
Jumlah (Orang)		-	1	1	3	5

Berdasarkan Tabel 4 di atas diperoleh informasi mengenai pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan sebanyak 5

orang, dengan rincian 1 orang telah mengikuti Diklat PIM-II, 1 orang telah mengikuti Diklat PIM-III, 3 orang telah mengikuti Diklat PIM-IV.

D. Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis Sumberdaya Aset/Sarana dan Prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi Aset/sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah Aset/Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 5
Aset Tanah

No	Nama Barang	Alamat/Lokasi	Luas (M2)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Zainab Bahmada (H. Yasin)	-	169.000.000
-	-	-	-	-

Tabel 6
Aset Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Alat-alat Angkutan		613.818.500
	Alat angkutan barang	2	262.236.000
	Alat angkutan sepeda motor	24	351.582.500
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga		443.893.000
	Mesin Ketik Manual Portable	1	2.000.000
	Filling Cabinet Besi	5	10.000.000

	Alat rumah tangga lain-lain	1	3.750.000
	Mesin Hitung Elektronik	8	2.000.000
	Laptop/Note Book	32	312.393.000
	Printer	18	49.400.000
	Modem	2	1.000.000
	Kipas Angin	11	9.850.000
	Dispenser	1	500.000
	Televisi	4	19.300.000
	AC Unit	2	9.200.000
	Mesin Absensi	1	2.500.000
	Mesin Potong Rumput	1	5.000.000
	Global Positioning System	1	7.500.000
	Lemari Es	1	2.500.000
	Stationary Generating Set	1	7.000.000
3	Alat Studio dan komunikasi		58.090.000
	Sound System	1	8.000.000
	Camera Video	3	31.390.000
	Layar Film/Projector	1	7.500.000
	Faximile	1	4.200.000
	Megaphone	2	3.000.000
	Loudspeaker	1	4.000.000
4	Meubeleur		95.210.000
	Meja ½ Biro	41	49.450.000
	Lemari Kayu	6	8.500.000
	Kursi Putar	9	12.480.000
	Kursi Tamu	2	7.500.000
	Kursi Lipat	20	7.000.000
	Kursi Fiber Gas/Plastik	118	8.280.000
	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	2	2.000.000

Tabel 7
Aset Gedung/Bangunan

No	Nama Barang	Alamat/Lokasi	Luas (M2)	Nilai (Rp)
-	-	-	-	-

Tabel 8
Aset Jalan

No	Nama Barang	Alamat/Lokasi	Luas (M2)	Nilai (Rp)
-	-	-	-	-

E. Keuangan

Tabel 9
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Anggaran
Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	3,024,020,726
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51,000,000
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39,000,000
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,000,000
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,000,000
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,367,290,726
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,312,520,726
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	49,770,000
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,000,000
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	329,852,000
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,000,000
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23,181,000
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,170,000
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	137,280,000
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	157,221,000

	dan Konsultasi SKPD	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84,756,000
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84,756,000
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110,602,000
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16,002,000
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94,600,000
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80,520,000
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74,840,000
2.09.01.2.09.01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,680,000
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	798,500,000
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	574,000,000
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	17,000,000
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan, dan Harga Pangan	27,000,000
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	530,000,000
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	92,000,000
2.09.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	12,000,000
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80,000,000
2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	10,000,000
2.09.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	10,000,000

2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	122,500,000
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	12,500,000
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	110,000,000
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	60,000,000
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	10,000,000
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	10,000,000
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	30,000,000
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	30,000,000
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	30,000,000

1.5 Sistematika LKj

Sistematika Penulisan LKj Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023 mengacu pada Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan Penyusunan LKj

- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan LKj
- 1.4. Gambaran Umum PD
 - A. SOTK
 - B. Isu Strategis PD
 - C. Keadaan Pegawai
 - D. Keadaan Sarana dan Prasarana
 - E. Keuangan
- 1.5. Sistematika LKj

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Strategis
 - A. Visi dan Misi Kepala Daerah
 - B. Tujuan dan Sasaran PD
 - C. Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.2. Perjanjian Kinerja
- 2.3. Rencana Anggaran PD
 - A. Target Belanja
 - B. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama PD
- 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.3. Realisasi Anggaran
- 3.4. Inovasi Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026 visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Bengkulu Selatan, adalah :

”Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS Berlandaskan CINTA BS”

Masyarakat madani yang ingin diwujudkan merupakan sebuah kondisi masyarakat yang berperadaban, dilandasi kokohnya kualitas kesehatan, pendidikan, ekonomi dan agamis, yang mengacu kepada nilai-nilai dasar persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada prinsip masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, saling toleransi, aspiratif, mampu berkoordinasi, mengakui emansipasi, dan menghormati hak asasi.

Untuk mewujudkan tatanan masyarakat madani tersebut, perlu ditingkatkan dan dilanjutkan pembangunan fondasi yang menopang pilar tegaknya kesejahteraan masyarakat, melalui:

1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang berorientasi kinerja,

2. Pembangunan jaringan ekonomi yang lebih luas yang berorientasi pada peningkatan *added value* (nilai tambah),
3. Peningkatan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi dan berkeadilan.

Guna merealisasikan visi mewujudkan masyarakat madani, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen menyelenggarakan pembangunan yang mengedepankan prinsip partisipatif, aspiratif dan merata, untuk mendorong terwujudnya Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera.

Elok : merupakan kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan yang indah dan memiliki daya tarik, baik itu dalam aspek keindahan yang alami seperti pemandangan alam maupun aspek keindahan yang dibentuk dari budaya, pariwisata berorientasi pada pengembangan kearifan lokal.

Maju : mengandung pengertian bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan akan terus maju kedepan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan sehingga mencapai tingkat peradaban yang tinggi dan berkembang.

Aman : adalah kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan yang mengancam keselamatan lahir dan batin serta terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Sejahtera : merupakan suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan kebutuhan akheratnya. Memiliki derajat kesehatan dan pendidikan yang tinggi serta terjamin kehidupan ekonominya.

Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani menuju Bengkulu Selatan EMAS tersebut, akan dibangun dan dikembangkan lebih

lanjut nilai-nilai yang dirasa mampu mendorong keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menumbuhkan empati, rasa saling menghargai, rasa saling memiliki dan rasa bertanggung jawab sehingga mampu mengembangkan semangat gotong royong ditengah masyarakat yang dikemas kedalam formula **“CINTA BS”**.

“CINTA BS” merupakan sebuah formulasi dari komitmen yang akan diwujudkan dalam mendorong keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- C = **C**erdas
- I = **I**ntegritas
- N = **i**Novatif
- T = **T**auladan
- A = **A**gamis
- BS = **B**erdaya **S**aing tinggi

CINTA BS tidak hanya menjadi sebuah bentuk rasa memiliki Bengkulu Selatan, namun lebih jauh diharapkan dapat menjelma menjadi sebuah kekuatan, bahwa masyarakat Bengkulu Selatan secara cerdas akan mendukung pembangunan guna mewujudkan Bengkulu Selatan yang lebih indah dengan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel, mampu berkompetisi dengan tangguh berlandaskan nilai-nilai agama dan adat, sehingga menempatkan Bengkulu Selatan sebagai daerah yang berdaya saing, sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang ditetapkan Misi lima tahun kedepan yang menjadi pedoman dalam Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu:

- Misi I : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing;
- Misi II : Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing;

Misi III : Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing;

Misi IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Dari ke-4 Misi Bupati tersebut, **Dinas Ketahanan Pangan termasuk dalam Misi II yaitu membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing.** Misi ini mengarah pada komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur yang mantap dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bengkulu Selatan, melalui pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar yang berkualitas mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, perumahan, kawasan permukiman, dan infrastruktur strategis dan prioritas lainnya yang terintegrasi dalam sebuah jaring pembangunan kawasan maju dan produktif.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

B. Tujuan dan Sasaran PD

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan selama 5 tahun . Tujuan merupakan pernyataan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang

dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Dalam mencapai tujuan Dinas Ketahanan Pangan yaitu **“Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat”** dengan sasaran **“Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat”**, maka ditetapkanlah beberapa program yang mendukung tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, antara lain :

- 1) Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
- 2) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- 3) Program penanganan kerawanan pangan; dan
- 4) Program pengawasan keamanan pangan

Pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai dengan indikator antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya skor PPH.
2. Meningkatnya pemanfaatan pekarangan masyarakat melalui pemberdayaan KWT P2KPG.
3. Menumbuhkan lembaga yang berfungsi untuk menstabilkan harga pangan, khususnya beras atau jagung.
4. Menurunnya jumlah desa rentan rawan pangan.
5. Meningkatnya jumlah desa yang mandiri pangan.
6. Meningkatnya mutu dan keamanan pangan masyarakat
7. Meningkatnya lumbung pangan desa.
8. Meningkatnya peran Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Tabel. Tujuan dan Sasaran, serta Target Indikator Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019-2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	-	85	86	86	87
			2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	81,5	82	82,5	82,5	83,5

C. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Ketahanan Pangan mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

Tabel . Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

VISI : Terwujudnya Masyarakat MadaniMenuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) Berlandaskan CINTA BS (Cerdas, Integritas, iNovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya Saing)			
MISI : Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat	1. Memacu ketersediaan pangan. 2. Penanganan daerah rawan pangan. 3. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
		Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan dengan merubah prilaku masyarakat dalam mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan dengan melakukan kampanye/promosi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. 2. Meningkatkan peran kelembagaan lokal dalam penyuluhan penganekaragaman pangan dan gizi.
		Mewujudkan stabilitas harga pangan pokok	1. Peningkatan akses pangan masyarakat. 2. Memperkuat kelembagaan lumbung pangan masyarakat. 3. Pemantauan harga pangan pokok

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Tabel . Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1.	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	87
		Skor PPH Konsumsi	83,5

Anggaran Organisasi Perangkat Daerah:

- APBD = Rp.3.912.520.726,-
- APBN = Rp. -

Tabel . Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2023
Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tertanganinya kerawanan pangan daerah	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	12%
1.1	Tersusunnya Peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Persentase Peta FSVA yang tersusun	100 %
1.2	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan daerah	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	100 %

Tabel . Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2023
Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang beragam	Persentase angka kecukupan energy (AKE)	50%
1.1	Tercapainya target konsumsi pangan perkapita/hari sesuai AKG	Jumlah konsumsi pangan perkapita/ hari	295 gr/kap /hr
2	Terawasinya keamanan pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	80%
2.1	Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar daerah	persentase pengawasan keamanan pangan segar daerah	100%

**Tabel . Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2023
Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya stabilitas harga pangan	Persentase stabilitas harga pangan di Tk. Produsen/Konsumen	100%
1.1	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah	Persentase pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	80%
1.2	Terkelolanya keseimbangan cadangan pangan daerah	Persentase cadangan pangan daerah	18,75 %
1.3	Tersedianya harga minimum daerah untuk pangan local	Harga minimum daerah untuk pangan local (umbi-umbian)	4,000

**Tabel . Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2023
SEKRETARIS**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya nilai AKIP	Nilai AKIP OPD	80
	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan	Persentase tindak lanjut LHP BPK	100%
	Meningkatnya tata kelola pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	Indeks kepuasan ASN	80
1.1	Meningkatnya komponen pemenuhan dokumen SAKIP	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP PD	100%
1.2	Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan PD	Persentase tindak lanjut LHP BPK	100%
1.3	Meningkatnya tata kelola pelayanan administrasi kepegawaian PD	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian ASN	80
1.4	Meningkatnya tata kelola pelayanan administrasi umum PD	Indeks kepuasan pelayanan umum ASN	80
1.5	Meningkatnya penyediaan barang milik PD	Persentase barang milik daerah PD yang disediakan	100%
1.6	Meningkatnya jasa penunjang urusan PD	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
1.7	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan PD	Persentase barang milik daerah pada OPD yang dipelihara	40%

2.3. RENCANA ANGGARAN PD

A. Target Belanja

Tabel. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	1. Nilai Akip OPD; 2. Persentase tindak lanjut LHP BPK; 3. Indeks Kepuasan ASN	80 100% 80	3.475.939.600
1.1	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP PD	100%	54.000.000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	39.000.000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tindak lanjut LHP BPK	100%	2.810.119.600
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 org/bln	2.764.439.600
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	40.680.000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan umum ASN	80	339.942.000
1.3.1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	3.000.000

1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	2.000.000
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	23.096.000
1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	7.170.000
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	137.280.000
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	167.396.000
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah PD yang disediakan	100%	84.756.000
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	84.756.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	106.602.000
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	16.002.000
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	90.600.000
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah pada OPD yang dipelihara	40%	80.520.000
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30 unit	74.840.000
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 unit	5.680.000

2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Persentase stabilitas harga pangan di tk. produsen/konsumen; 2. Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	100% 50%	798.500.000
2.1	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Pangan Lainnya	Persentase pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	80%	574.000.000
2.1.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	17.000.000
2.1.2	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	1 dokumen	27.000.000
2.1.3	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	4 unit	530.000.000
2.2	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota	Persentase cadangan pangan daerah	18,75%	92.000.000
2.2.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana kebutuhan pangan local	1 dokumen	12.000.000
2.2.2	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	12 ton	80.000.000
2.3	Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Harga minimum daerah untuk pangan local	4.000,00	10.000.000
2.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	1 Laporan	10.000.000
2.4	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan	Jumlah konsumsi pangan perkapita/hari	295 gr/kap/hr	122.500.000

	Gizi			
2.4.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan perkapita/tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	1 dokumen	12.500.000
2.4.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	110.000.000
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	12%	60.000.000
3.1	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Peta FSVA yang tersusun	100%	10.000.000
3.1.1	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutahirkan	1 dokumen	10.000.000
3.2	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	100%	50.000.000
3.2.1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	80%	30.000.000
4.1	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	Persentase pengawasan keamanan pangan segar daerah	100%	30.000.000
4.1.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	30.000.000

Dari Tabel. Program dan Kegiatan diatas, disusunlah target belanja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel . Rencana Anggaran Belanja Per triwulan Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Rencana Anggaran Per Triwulan			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	3.024.020.726,-				
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	51.000.000,-				
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.000.000,-	11.700.000,-	11.700.000,-	7.800.000,-	7.800.000,-
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,-	5.000.000,-			
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000,-	5.000.000,-	2.000.000,-		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.367.290.726,-				
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.312.520.726,-	691.109.895	691.109.895	691.109.895	239.191.041
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	49.770.000,-	10.170.000,-	10.170.000,-	10.170.000,-	19.260.000,-
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,-	5.000.000,-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	329.852.000,-				
1. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,-	750.000,-	750.000,-	750.000,-	750.000,-
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-		
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.181.000,-	5.774.001,-	5.774.001,-	5.774.001,-	5.858.997,-
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.170.000,-	1.792.500,-	1.792.500,-	1.792.500,-	1.792.500,-
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	137.280.000,-	44.320.000,-	44.320.000,-	44.320.000,-	4.320.000,-
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.221.000,-	41.849.001,-	41.849.001,-	41.849.001,-	31.673.997,-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.756.000,-				
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.756.000,-	84.756.000,-			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.602.000,-				
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.002.000,-	4.000.500,-	4.000.500,-	4.000.500,-	4.000.500,-
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.600.000,-	22.650.000,-	22.650.000,-	22.650.000,-	26.650.000,-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.520.000,-				
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.840.000,-	33.434.999,-	22.334.999,-	9.534.999,-	9.535.003,-
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000,-	2.840.000,-	2.840.000,-		

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	798.500.000,-				
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Pangan Lainnya	574.000.000,-				
1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	17.000.000,-	5.900.000,-	5.935.000,-	3.927.000,-	1.238.000,-
2. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	27.000.000,-	7.600.400,-	7.393.000,-	7.008.600,-	4.998.000,-
3. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	530.000.000,-	486.850.000,-	26.400.000,-	16.209.600,-	540.400,-
Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota	92.000.000,-				
1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	12.000.000,-	5.382.000,-	5.030.000,-	1.588.000,-	
2. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80.000.000,-	68.500.000,-	7.117.000	3.383.000,-	1.000.000,-
Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	10.000.000,-				
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	10.000.000,-	4.270.500,-	3.836.500,-	1.893.000,-	
Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	122.500.000,-				
1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan perkapita/tahun	12.500.000,-	4.100.000,-	4.041.000,-	3.403.800,-	955.200,-
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	110.000.000,-	41.680.000,-	41.850.000,-	26.470.000,-	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	60.000.000,-				
Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	10.000.000,-				
1. Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	10.000.000,-	3.900.000,-	3.280.000,-	2.820.000,-	
Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,-				
1. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,-	39.035.100,-	8.164.900,-	2.800.000,-	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	30.000.000,-				
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	30.000.000,-				
1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,-	30.000.000,-			
TOTAL	3.912.520.726	1.668.364.896	975.338.296	909.253,896	359.653.638

B. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Tabel . Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Dinas Ketahanan Pangan
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Anggaran (Rp.)
1	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	Terwujudnya stabilitas harga pangan	Persentase stabilitas harga pangan di tk. produsen/konsumen	798.000.000
		Skor PPH Konsumsi	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang beragam	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	
			Tertanganinya kerawanan pangan daerah	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	60.000.000
			Terawasinya keamanan pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	30.000.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja pemerintah merupakan bentuk realisasi kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 7. Skala Penilaian Terhadap Kinerja Pemerintah

No	Kinerja	Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama PD

Capaian Indikator Kinerja Utama dari Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat dari Analisis pada table-tabel sebagai berikut:

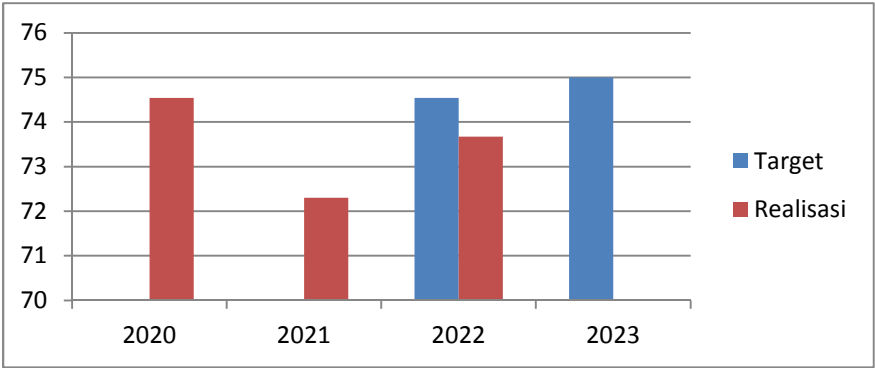
TABEL . INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON II TAHUN 2023

	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	1. Nilai Skor PPH Ketersediaan	$\% \text{ AKE} \times \text{bobot},$ dimana $\% \text{ AKE} = \frac{\text{Energi Konsumsi Pangan}}{\text{AKE Konsumsi}} \times 100\%$ bobot = bobot masing-masing golongan pangan	Neraca Bahan Makanan	87	93,16
				2. Nilai Skor PPH Konsumsi	$\% \text{ AKE} \times \text{bobot},$ dimana $\% \text{ AKE} = \frac{\text{Energi Konsumsi Pangan}}{\text{AKE Konsumsi}} \times 100\%$ bobot = bobot masing-masing golongan pangan	Susenas BPS	83,5	89,2

TABEL . CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN DINAS KETAHANAN PANGAN

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023	
							Target	Realisasi
1	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	-	74,54	72,30	73,67	75,00	Blm rilis

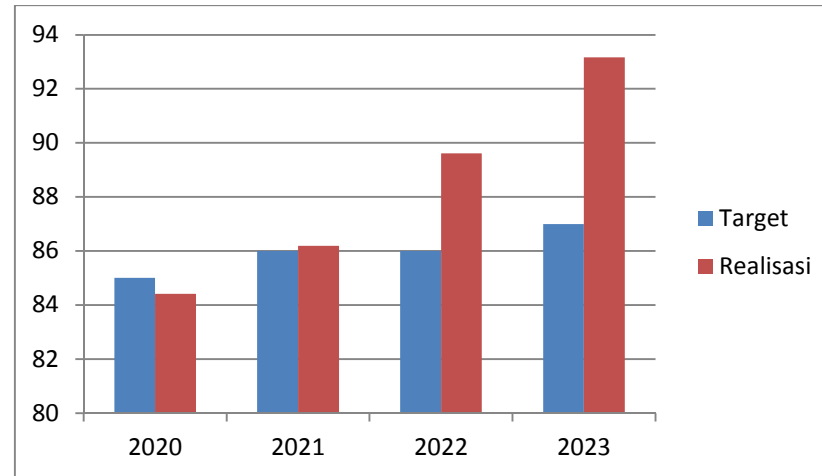
Grafik. Capaian Indikator Tujuan (IKP) Tahun 2020-2023



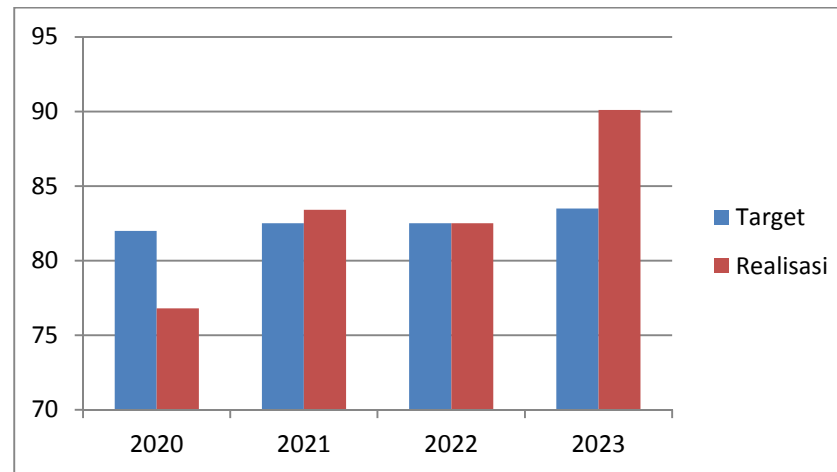
Tabel . Capaian Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Tahun 2023		Capaian (%)	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
						Target	Realisasi			
1.	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	84,41	86,19	89,61	87	93,16	100	90	100
		Skor PPH Konsumsi	76,8	83,4	82,5	83,5	89,2	100	86,5	100

Grafik. Capaian Indikator Kinerja Eselon II (Skor PPH Ketersediaan) Tahun 2020-2023



Grafik. Capaian Indikator Kinerja Eselon II (Skor PPH Konsumsi) Tahun 2020-2023



Tabel . Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2023
Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023	
				Target	Realisasi
1	Tertanganinya kerawanan pangan daerah	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	20,59%	12%	20,69%
1.1	Tersusunnya Peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Persentase Peta FSVA yang tersusun	100%	100 %	100%
1.2	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan daerah	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	100%	100 %	100%

Tabel . Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2023
Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023	
				Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang beragam	Persentase angka kecukupan energy (AKE)	47,77%	50%	48,5%
1.1	Tercapainya target konsumsi pangan perkapita/hari sesuai AKG	Jumlah konsumsi pangan perkapita/ hari	278 gr/kap/hr	295 gr/kap/hr	275,3 gr/kap/hr
2	Terawasinya keamanan pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	80%	80%	70,59%
2.1	Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar daerah	persentase pengawasan keamanan pangan segar daerah	100%	100%	100%

Tabel . Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2023

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023	
				Target	Realisasi
1	Terwujudnya stabilitas harga pangan	Persentase stabilitas harga pangan di Tk. Produsen/Konsumen	100%	100%	100%
1.1	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah	Persentase pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	80%	80%	80%
1.2	Terkelolanya keseimbangan cadangan pangan daerah	Persentase cadangan pangan daerah	5%	18,75 %	15,08%
1.3	Tersedianya harga minimum daerah untuk pangan lokal	Harga minimum daerah untuk pangan local (umbi-umbian)	-	4,000	3,000

Tabel . Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2023
SEKRETARIS

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023	
				Target	Realisasi
1	Meningkatnya nilai AKIP	Nilai AKIP OPD		80	60,11
	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan	Persentase tindak lanjut LHP BPK	100%	100%	100%
	Meningkatnya tata kelola pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	Indeks kepuasan ASN	80	80	80
1.1	Meningkatnya komponen pemenuhan dokumen SAKIP	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP PD	100%	100%	100%
1.2	Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan PD	Persentase tindak lanjut LHP BPK	100%	100%	100%
1.3	Meningkatnya tata kelola pelayanan administrasi kepegawaian PD	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian ASN	80	80	80
1.4	Meningkatnya tata kelola pelayanan administrasi umum PD	Indeks kepuasan pelayanan umum ASN	80	80	80
1.5	Meningkatnya penyediaan barang milik PD	Persentase barang milik daerah PD yang disediakan	100%	100%	100%
1.6	Meningkatnya jasa penunjang urusan PD	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
1.7	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan PD	Persentase barang milik daerah pada OPD yang dipelihara	40%	40%	40%

Tabel . Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	93,16	100	93,16
		2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	90,1	100	89,2

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Tabel . Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	-	87	93,16	100%
Nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	-	83,5	89,2	100%

No .	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	87	93,16	100	Berhasil	-
		2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	83,5	89,2	100	Berhasil	-

Dari tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 sudah 100%. Hal ini tidak terlepas dari program kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah antara lain :

- 1) Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Daerah melalui pemberian/pembagian bibit nangka mini yang di laksanakan

pada bulan September 2023. Pembagian bibit nangka mini ini dilakukan di 6 desa di 2 kecamatan antara lain :

1. Kecamatan Kedurang Ilir

- Desa Lubuk Ladung
- Desa Sukarami
- Desa Karang Caya

2. Kecamatan Kedurang

- Desa Sukananti
- Desa Nanti Agung
- Desa Rantau Sialang

Kegiatan penyerahan bantuan bibit nangka mini diawali dengan:

1. Pemetaan Daerah Rawan Pangan;
2. Melaksanakan Identifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) dan data potensi Desa Rawan Pangan (Tofografi Desa) Kegiatan Identifikasi CPCL dilaksanakan di 9 Desa yang ada di Kecamatan Kedurang Ilir dan Kedurang;
3. Sosialisasi Program Serumpun yang dilaksanakan bersamaan dengan CPCL;
4. Penyampaian proposal dari Desa;
5. Penetapan Daerah Penerima bantuan bibit nangka;
6. Melaksanakan rapat persiapan penyaluran/ pembagian bibit nangka. Rapat persiapan penyaluran/ pembagian bibit nangka dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan pada tanggal 06 September 2023 yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa yang menerima bantuan bibit nangka.

Berikut dokumentasi kegiatan penanganan kerawanan pangan di 6 desa tersebut :

Gambar 3.30
Penyerahan Bibit Nangka Mini di Ds. Lubuk Ladung Kec. KDI



Sumber. Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

Gambar 3.31
Penyerahan Bibit Nangka Mini di Ds. Sukarami Kec. KDI





Sumber. Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

Gambar 3.31
Penyerahan Bibit Nangka Mini di Ds. Karang Caya Kec. KDI



Sumber. Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

Gambar 3.31
Penyerahan Bibit Nangka Mini di Ds. Sukananti Kec. Kedurang



Sumber. Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

Gambar 3.31
Penyerahan Bibit Nangka Mini di Ds. Nanti Agung Kec. Kedurang





Sumber. Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

Gambar 3.31
Penyerahan Bibit Nangka Mini di Ds. Rantau Sialang Kec. Kedurang



Sumber. Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

Gambar 3.31
Monitoring Tanaman Nangka Mini



Sumber. Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

- 2) Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan. Sub kegiatan ini mempunyai keluaran jumlah dokumen NBM dengan target 1 dokumen. Dokumen tersebut adalah dokumen Neraca Bahan Makanan, dimana dalam dokumen tersebut dapat mengukur skor PPH Ketersediaan. Total ketersediaan energi per kapita perhari berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) pada tahun 2023 adalah 3.311 kkal/kap/hr, dan ketersediaan protein 110,66 gram/kap/hr, dengan tingkat ketersediaan energi tahun 2023 adalah 137,95% dan tingkat ketersediaan protein 175,65%. Ketersediaan energi dan protein wilayah Bengkulu Selatan sudah melebihi anjuran

Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.400 kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein 63 gram/kap/hr (berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012).

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2023 dengan data Tahun 2022, Pola Keragaman Pangan atau yang disebut Pola Pangan Harapan (PPH) pada tingkat ketersediaan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.30
Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan
Berdasarkan Neraca Bahan Makanan 2023

Kelompok Pangan	Energi (kalori)	% AKE	Bobot	Skor rill	Skor PPH	Skor Maks	Ket
Padi-padian	2.145	89,4	0,5	44,69	25,00	25,0	+
Umbi-umbian	142	5,9	0,5	2,95	2,50	2,5	+
Pangan hewani	362	15,1	2,0	30,20	24,00	24,0	+
Minyak dan lemak	272	11,3	0,5	5,67	5,00	5,0	+
Buah/biji berminyak	37	1,5	0,5	0,77	0,77	1,0	-
Kacang-kacangan	117	4,9	2,0	9,79	9,79	10,0	-
Gula	111	4,6	0,5	2,32	2,37	2,5	-
Sayuran dan buah	114	4,7	5,0	23,72	23,72	30,0	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	3.301	137,5		120,11	93,16	100	

Sumber. Dinas Ketahanan Pangan 2023

Ketersediaan kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, pangan hewan, minyak/lemak sudah cukup baik. Namun ketersediaan untuk kelompok buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah, dan lain-lain masih kurang karena ketersediaanya masih dibawa skor PPH yang dianjurkan.

- 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal yang mempunyai keluaran dokumen rencana kebutuhan pangan local.

Tabel 3.31
Identifikasi Pangan Lokal di Tiap Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Nama Komoditi	Produksi/thn (Ton)	Luas lahan (Ha)
1	Manna	Ubi Kayu	200	15
		Ubi Jalar	80	6
		Pisang	30	5

2	Kt. Manna dan Psr. manna	Ubi Kayu	36	19.5
		Sukun	1.8	0.5
		Labu Kuning	20	1
		Talas	12	0.5
		Pisang	40	7.5
3	Kedurang	Ubi Kayu	60	4
		Ubi Jalar	24	2
4	Bunga Mas	Jagung	600	672
		Ubi Kayu	6	6
		Kacang Tanah	4	6
		Kacang Hijau	1.5	3
5	Kedurang Ilir	Ubi Kayu	1	7,5
		Ubi Jalar	1,5	7
		Jagung Manis	2	2
		Ubi Talas	0,25	1,5
		Ubi Suweg/Porang	1	1
6	Seginim	Ubi Kayu	70	5
		Ubi Jalar	7,3	1,5
		Pisang	73	9
		Labu manis	6,75	1,5
7	Air Nipis	Ubi Kayu	312	12
		Ubi Jalar	7,5	1,5
		Pisang	73	9
		Labu Manis	10,5	3,5
8	Pino	Ubi Kayu	72	12
		Ubi Jalar	4	1
		Pisang	86	43
		Jagung	60	15
9	Pino Raya	Ubi Kayu	10	200
		Ubi Jalar	5	75
10	Ulu Manna	Jagung	608	273
		Kacang Tanah	20	20
		Kacang Hijau	12	10
		Ubi Kayu	36	12
		Ubi Jalar	-	14,7
		Pisang	-	24,6

Sumber data : BPP Se- Kecamatan Kab. Bengkulu Selatan

- 4) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan keluaran jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain :

- Demplot halaman kantor yang dilaksanakan pada bulan Februari s/d Desember Tahun 2023 bertempat di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Pembinaan Kelompok penerima manfaat Kegiatan P2KP pada bulan Mei s/d Desember Tahun 2023 di 7 desa yaitu (1) KWT Makmur Sehati Ds. Pagar Gading Kec. Pino Raya, (2) KWT Melati Ds. Pagar Banyu Kec. Kedurang Ilir, (3) KWT Cempaka Putih Ds. Air Sulau Kec. Kedurang Ilir, (4) KWT Mawar Merah Ds. Padang Burnai Kec. Bunga Mas, (5) KWT Anggrek Ds. Tanjung Eran Kec. Pino, (6) KWT Harapan Kita Ds. Padang Mumpo Kec. Pino, serta (7) KWT Taman Indah Kelurahan Gunung Ayu Kec. Kota Manna.
- Pembinaan Kelompok penerima manfaat Kegiatan Urban Farming (Pertanian Perkotaan) pada bulan September s/d Desember Tahun 2022 di 2 kelurahan yaitu KWT Tomat Kelurahan Padang Kapuk Kec. Kota Manna dan KWT Harapan Maju Kelurahan Gunung Mesir Kec. Pasar Manna.

Berikut kegiatan P2KP dan Urban Farming yang dilaksanakan dapat terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.32
Pelaksanaan Kegiatan P2KP





Sumber. Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

Gambar 3.32
Pelaksanaan Kegiatan Urban Farming





Sumber. Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

- 5) Kegiatan Penyusunan target konsumsi pangan per kapita per tahun bisa diketahui melalui pengukuran pola pangan harapan. Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Tujuan penyusunan PPH adalah untuk membuat suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai cita rasa (FAO-RAPA, 1989).

Dalam penentuan PPH, bahan pangan dikelompokkan menjadi Sembilan :

- 1) Padi-padian (beras, jagung, terigu, dan hasil olahannya)
- 2) Umbi-umbian/pangan berpati (ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, sagu, dan hasil olahannya)
- 3) Pangan hewani (ikan, daging, telur, susu dan hasil olahannya)
- 4) Minyak dan lemak (minyak kelapa, minyak jagung, minyak goreng/kelapa sawit dan margarin)
- 5) Buah dan biji berminyak (kelapa, kemiri, mete dan cokelat)

- 6) Kacang-kacangan (kedele, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang polong, kacang tunggak dan kacang lainnya)
- 7) Gula (gula pasir, gula merah dan sirup)
- 8) Sayuran dan buah (semua jenis sayuran dan buah-buahan)
- 9) Lain-lain

Tabel 3.33
Situasi Konsumsi Pangan berdasarkan Data Analisa Konsumsi Tingkat Rumah Tangga di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Gram/Kap/Hari		Energi Kkal/Kap/Hr		% AKE		Skor PPH	Skor Mak-simal
		Ideal	Aktual	Ideal	Aktual	Ideal	Aktual		
1	Padi-padian	275	314,1	1.050	1.202	60,9	57,3	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	90	33,5	126	38	1,4	1,8	0,9	2,5
3	Pangan hewani	140	125,1	252	249	10,8	11,9	23,7	24,0
4	Minyak dan lemak	25	20,7	210	186	10,2	8,9	4,4	5,0
5	Buah/biji berminya	10	26,5	63	142	5,9	6,7	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	35	11,9	105	53	1,5	2,5	5,1	10,0
7	Gula	30	12,1	105	45	2,7	2,1	1,1	2,5
8	Sayuran dan buah	230	220,2	126	118	4,9	5,6	28,0	30,0
9	Lain-lain	15	65,4	63	41	1,7	2,1	0,00	0,00
Jumlah		-		2.100	2.074	100	98,8	89,2	100

Sumber. Dinas Ketahanan Pangan 2023

Dari tabel diatas, terlihat bahwa secara umum total konsumsi energy actual sebesar 2.074 kkal/kap/hari lebih tinggi total kebutuhan energy ideal di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu 2.100 kkal/kap/hari. Dari hasil analisis konsumsi tingkat rumah tangga terlihat bahwa skor PPH Konsumsi aktual di Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 89,2.

- 6) Pada kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, dimana keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dilaksanakan terhadap produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan organic, baik ditingkat

budidaya, penerapan maupun yang beredar di pasar.
Kegiatan ini meliputi :

- (1) Pengadaan rapid test kit untuk deteksi cepat residu pestisida dan atau mikroba.
- (2) Pengujian keamanan pangan segar.
- (3) Melakukan pemantauan, pengawasan keamanan pangan segar.

Hasil pengawasan pangan segar dapat dilihat dari table dibawah ini :

Pada Tanggal 18 April 2023:

- ✓ Pasar Kutau (Cabe, Tomat, Brokoli, Anggur dan Mangga Indramayu)
Total sampel yang diuji adalah sebanyak 5 (lima) sampel pangan segar.

Nomor Sampel	Jenis Sampel	Asal Sampel	Kandungan Yang Di Uji	Hasil Pengujian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
001	Cabe	Seginim	Pestisida	Negatif (-)	Aman
002	Tomat	Curup	Pestisida	Negatif (-)	Aman
003	Brokoli	Curup	Pestisida	Negatif (-)	Aman
004	Anggur	Cina	Formalin	Positif (+)	Tidak Aman
005	Manga Indramayu	Jawa	Formalin	Negatif (-)	Aman

Sumber. Dinas Ketahanan Pangan Kab. BS

Dari ke-5 sampel diatas terlihat bahwa Anggur asal Cina Tidak Aman dikonsumsi karena positif mengandung formalin.

Pada Tanggal 09 Agustus 2023:

- ✓ Pasar Ampera (Cabe, Brokoli, Bunga Kol, Tomat, Bawang Daun, Anggur, dan Pir). Total sampel yang diuji adalah sebanyak 7 (Tujuh) sampel pangan segar.

Nomor Sampel	Jenis Sampel	Asal Sampel	Kandungan Yang Di Uji	Hasil Pengujian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
001	Cabe	Seginim	Pestisida	Positif (+)	Tidak Aman
002	Brokoli	Curup	Pestisida	Negatif (-)	Aman
003	Bunga	Curup	Pestisida	Positif (+)	Tidak Aman

	Kol				
004	Tomat	Pagaralam	Pestisida	Positif (+)	Tidak Aman
005	Bawang Daun	Seginim	Pestisida	Negatif (-)	Aman
006	Anggur	Cina	Formalin	Negatif (-)	Aman
007	Pir	Cina	Formalin	Negatif (-)	Aman

Sumber. Dinas Ketahanan Pangan Kab. BS

Dari ke-7 sampel diatas terlihat bahwa Cabe asal Seginim, Bunga Kol asal Curup, dan Tomat asal Pagaralam Tidak Aman dikonsumsi karena positif mengandung pestisida.

Pada Tanggal 25 Oktober 2023:

- ✓ Pasar Kayu Kunyit (Kubis, Mangga Indramayu, Pir, Cabe, dan Tomat). Total sampel yang diuji adalah sebanyak lima (Lima) sampel pangan segar.

Nomor Sampel	Jenis Sampel	Asal Sampel	Kandungan Yang Di Uji	Hasil Pengujian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
001	Kubis	Pagaralam	Pestisida	Negatif (-)	Aman
002	Mangga Indramayu	Jawa	Formalin	Negatif (-)	Aman
003	Pir	Cina	Formalin	Negatif (-)	Aman
004	Cabe	Seginim	Pestisida	Positif (+)	Tidak Aman
005	Tomat	Curup	Pestisida	Negatif (-)	Aman

Sumber. Dinas Ketahanan Pangan Kab. BS

Dari ke-5 sampel diatas terlihat bahwa Cabe asal Seginim tidak aman dikonsumsi karena positif mengandung Pestisida.

Gambar 3.33
Pengambilan sampel di Pasar





Sumber. Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

Gambar 3.33
Pengujian sampel



Sumber. Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

- 7) Perkembangan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pengelolaannya diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang ditanda tangani tanggal 8 Agustus 2017. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, pada tahun 2023 telah dilakukan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Selatan sebanyak 5.000 Kg melalui alokasi APBD Kabupaten Bengkulu Selatan. Jumlah ini belum sesuai dengan Keputusan Bupati nomor 526.600 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang menetapkan target jumlah cadangan pangan pemerintah daerah sebesar 33,16 ton.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 juga mendapatkan Dana Dekon sebesar Rp. 3.680.000 yang peruntukannya untuk Belanja Bahan Rapat Pertemuan Rp. 1.000.000 ,Belanja Perjalanan Biasa Rp. 2.080.000,- dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 600.000,-.

Tahun 2023 dilakukan penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah sebanyak 5.017,6 Kg pemanfaatannya untuk Warga terdampak Kekeringan di 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati No. 526.629 Tahun 2023 tanggal 21 November 2023 yaitu Kecamatan Manna dan Kecamatan Seginim. Stok Beras Cadangan Pangan Pemerintah per 31 Desember 2023 sebanyak 6,160,47 Kg. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tidak disimpan digudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tetapi dititipkan di Perum Bulog sesuai dengan perjanjian kerja Nomor 256/SPK-DKP/2023 tanggal 16 November 2023. Pertimbangan tidak disimpan digudang karena kondisi gudang rusak dan belum adanya petugas yang khusus menangani dan mengelola gudang.

Untuk tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tidak mengalokasikan Cadangan Pangan Pemerintah di karenakan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Khususnya Dinas Ketahanan Pangan fokus untuk penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ada.

Berikut gambar-gambar penyerahan cadangan pangan pemerintah di beberapa kecamatan :

Gambar 3.36
Simbolis Penyerahan Bantuan Cadangan Pangan Tahun 2023



Sumber. Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

8) Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia. Sub kegiatan ini mempunyai keluaran jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia yang dikembangkan dengan target 4 unit. Kegiatan di seksi distribusi pangan meliputi :

- 1. Memberdayakan gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha distribusi pangan, pemasaran, pengolahan dan pengemasan pangan.

Gapoktan yang diberdayakan antara lain :
Gapoktan Empat Serangkai Desa Melao Kec. Manna,
Gapoktan Tiga Serangkai Desa Pajar Bulan Kec. Kedurang, Gapoktan Sejahtera Desa Beringin Datar Kec. Pino, Gapoktan Bukit Barisan Desa Sukarami Kec. Air Nipis.

Tabel 3.34
Data Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat {LDPM}

No.	Jenis kegiatan	LDPM Empat Serangkai	LDPM Tiga Serangkai	LDPM Bukit Barisan	LDPM Sejahtera
1.	Pembelian - Gabah {Ton} - Beras {Ton}	280 280	240 150	- 2	
2.	Penjualan - Gabah {Ton} - Beras {Ton}	275 277	230 147	- 1,5	
3.	Stok - Gabah {Ton} - Beras {Ton}	5 3	10 3	- 0,5	
4.	Penggilingan {Ton}	275	220	-	1,28
5.	Harga - Gabah {Rp} - Beras {Rp}	6.500 12.500	6.500 12.500	6.500 12.500	
6.	Pemasaran	Manna Seluma Bengkulu	Manna Bengkulu Bintuhan Lampung	-	
7.	Keterangan	Jual Beli gabah/beras dan penggilingan	Jual beli gabah/beras dan penggilingan	Cadangan pangan sudah didistribusikan sebanyak 5,572 ton	Baru usaha jasa penggilingan

Sumber. Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bengkulu Selatan

Gambar 3.37
Pembinaan LDPM



Sumber. Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

2. Gerakan Pasar Murah ERAGRO (Ecer Rasa Grosir) adalah kegiatan penyaluran pangan dan kebutuhan lainnya kepada masyarakat baik secara offline maupun online yang dilaksanakan setiap bulan selama 5 hari yang bertujuan agar masyarakat mudah mengakses bahan pangan pokok, dan barang kebutuhan sehari-hari dengan harga murah dan berkualitas baik. Pelaksanaan Pasar murah Eragro Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan bekerja sama dengan LDPM, Suplier dan Peternak ayam petelur dengan cara menjual barang harga grosir ke masyarakat sehingga barang yang dijual murah.

Gambar 3.37
Kegiatan Gerakan Pasar Murah ERAGRO



Sumber. Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

3. Mendistribusikan bahan pangan murah bagi masyarakat (Gerakan Pasar Murah).

Kegiatan Gerakan Pangan Murah untuk pengendalian inflasi pangan daerah di 11 Kecamatan bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional sebanyak 11 kali .selain itu, juga dilakukan Gerakan Pangan Murah secara serentak se-Indonesia yang berkerja sama dengan Badan Pangan Nasional dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 di Lapangan Sekundang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pada Tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan mendapatkan alokasi untuk kegiatan pengendalian inflasi sebesar Rp. 500.000.000,-. Kegiatan yang dilakukan adalah pengadaan Cadangan Pangan (beras) sebanyak 35 ton. Hanya saja cadangan pangan (beras) tersebut baru akan disalurkan ditahun 2024.

Berikut dokumentasi kegiatan Gerakan Pangan murah di tiap Kecamatan :

Gambar 3.37
Kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kecamatan



Sumber. Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

9) Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan, dan Harga Pangan. Sub kegiatan ini mempunyai keluaran jumlah dokumen pemantauan stok, pasokan, dan harga pangan. Kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a) Pengamatan Harga Pangan
 - Pengamatan harga yang diamati yaitu harga produsen dan harga pedagang (pedagang grosir dan pedagang eceran)
 - Diamati dan up date Setiap hari
 - Pengambilan data dimulai sejak bulan Januari s/d Desember 2023
 - Pengamatan dilakukan sebanyak 365 kali selama satu tahun
- b) Analisa harga pangan dilakukan setelah data masuk analisa dilakukan untuk mengetahui keadaan harga terutama hari-hari besar yaitu hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, natal dan tahun baru.

Komoditas pemantauan harga pangan tersebut antara lain : Beras premium, Beras medium (kg), Kedelai biji kering (impor) (kg), Bawang merah (kg), Bawang putih bonggol (kg), Cabe merah keriting (kg), Cabe rawit merah (kg), Daging ayam ras (kg), Daging sapi murni (kg), Telur ayam ras (kg), Gula konsumsi (kg), Minyak goreng kemasan (kg), Tepung terigu (curah) (kg), Ikan tongkol (kg), Garam halus beryodium (kg), Tepung terigu kemasan (kg).

Berikut dokumentasi pemantauan harga pangan di tiap kecamatan antara lain :

Gambar 3.38
Pemantauan Harga Pedagang Eceran di Pasar Ampera



Sumber. Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

Tabel . Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran 2023			Tingkat Efisien
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	87	93,16	100	3.912.520.726	3.638.854.109	93,01	Efisien
		83,5	89,2	100				

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA				3.024.020.726	2.821.136.059	93,29	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah				51.000.000	49.676.700	97,41	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	100	39.000.000	38.249.000	98,07	Efisien

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	100	5.000.000	4.852.700	97,05	Efisien
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100	7.000.000	6.575.000	93,93	Efisien
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.367.290.726	2.176.782.358	91,95	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang			2.312.520.726	2.122.182.358	91,77	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	100	49.770.000	49.770.000	100,00	Efisien
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100	5.000.000	4.830.000	96,60	Efisien
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				329.852.000	329.558.989	99,91	
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100	3.000.000	2.999.000	99,97	Efisien
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket	100	2.000.000	1.998.000	99,90	Efisien
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket	100	23.181.000	23.052.500	99,45	Efisien

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket	100	7.170.000	7.137.000	99,54	Efisien
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 dokumen	1 dokumen	100	137.280.000	137.280.000	100,00	Efisien
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100	157.221.000	157.092.489	99,92	Efisien
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				84.756.000	84.000.000	99,11	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 unit	8 unit	100	84.756.000	84.000.000	99,11	Efisien
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				110.602.000	106.042.012	95,88	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	1 laporan	100	16.002.000	14.442.012	90,25	Efisien
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	1 laporan	100	94.600.000	91.600.000	96,83	Efisien
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80.520.000	75.076.000	93,24	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30 unit	30 unit	100	74.840.000	69.400.000	92,73	Efisien
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 unit	8 unit	100	5.680.000	5.676.000	99,93	Efisien
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100%	100%	100%	798.500.000	729.523.300	91,36	
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Pangan Lainnya	80%	80%	100%	574.000.000	513.815.900	89,51	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 laporan	1 laporan	100	17.000.000	16.300.150	95,88	Efisien
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 dokumen	1 dokumen	100	27.000.000	26.677.250	98,80	Efisien

	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	4 unit	4 unit	100	530.000.000	470.838.500	88,84	Efisien
	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota	18,75%	15,08%	80,43%	92.000.000	84.518.100	91,87	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 dokumen	1 dokumen	100	12.000.000	11.457.400	95,48	Efisien
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5 ton	5 ton	100	80.000.000	73.060.700	91,33	Efisien
	Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	4000	3000	100	10.000.000	9.749.900	97,50	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 laporan	1 laporan	100	10.000.000	9.749.900	97,50	Efisien
	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	295 gr/kap/hr	269,5 gr/kap/hr	100	122.500.000	121.439.400	99,13	

	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan perkapita/tahun	1 dokumen	1 dokumen	100	12.500.000	12.408.250	99,27	Efisien
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	1 laporan	100	110.000.000	109.031.150	99,12	Efisien
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	12%	20,69%	100	60.000.000	59.316.750	98,86	
	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	100%	100%	100	10.000.000	9.932.700	99,33	
	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 dokumen	1 dokumen	100	10.000.000	9.932.700	99,33	Efisien
	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	100	50.000.000	49.384.050	98,77	

	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100	50.000.000	49.384.050	98,77	Efisien
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	80%	70,59%	88,24%	30.000.000	28.878.000	96,26	
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	100%	100%	100	30.000.000	28.878.000	96,26	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100	30.000.000	28.878.000	96,26	Efisien

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

Program dan Kegiatan	Dana Kegiatan		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	3.024.020.726,-	2.821.136.059,-	93,29
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	51.000.000,-	49.676.700,-	97,41
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.000.000,-	38.248.000,-	98,07
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,-	4.852.700,-	97,05
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000,-	6.575.000,-	93,93
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.367.290.726,-	2.176.782.358,-	91,95
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.312.520.726,-	2.122.182.358,-	91,77
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	49.770.000,-	49.770.000,-	100
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,-	4.830.000,-	96,60
Administrasi Umum Perangkat Daerah	329.852.000,-	329.558.989,-	99,91
7. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,-	2.999.000,-	99,97
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000,-	1.998.000,-	99,90
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.181.000,-	23.052.500,-	99,45
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.170.000,-	7.137.000,-	99,54
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	137.280.000,-	137.280.000,-	100
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.221.000,-	157.092.489,-	99,92
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.756.000,-	84.000.000,-	99,11
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.756.999,-	84.000.000,-	99,11
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.602.000,-	106.042.012,-	95,88
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.002.000,-	14.442.012,-	90,25
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.600.000,-	91.600.000,-	96,83
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.520.000,-	75.076.000,-	93,24
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.840.000,-	69.400.000,-	92,73
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000,-	5.676.000,-	99,93
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	798.500.000,-	729.523.300,-	91,36
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Pangan Lainnya	574.000.000,-	531.815.900,-	89,51
4. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	17.000.000,-	16.300.150,-	95,88
5. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	27.000.000,-	26.677.250,-	98,80
6. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	530.000.000,-	470.838.500,-	88,84
Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota	92.000.000,-	84.518.100,-	91,87

3. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	12.000.000,-	11.457.400,-	95,48
4. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80.000.000,-	73.060.700,-	91,33
Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	10.000.000,-	9.749.900,-	97,50
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	10.000.000,-	9.749.900,-	97,50
Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	122.500.000,-	121.439.400,-	99,13
3. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan perkapita/tahun	12.500.000,-	12.408.250,-	99,27
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	110.000.000,-	109.031.150,-	99,12
Program Penanganan Kerawanan Pangan	60.000.000,-	59.316.750,-	98,86
Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	10.000.000,-	9.932.700,-	99,33
2. Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	10.000.000,-	9.932.700,-	99,33
Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,-	49.384.050,-	98,77
2. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,-	49.384.050,-	98,77
Program Pengawasan Keamanan Pangan	30.000.000,-	28.878.000,-	96,26
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	30.000.000,-	28.878.000,-	96,26
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,-	28.878.000,-	96,26
JUMLAH	3.912.520.726,-	3.638.854.109,-	93,01

3.4 Inovasi Perangkat Daerah

Untuk mendukung pencapaian Kinerja Bappeda Litbang, berikut beberapa inovasi yang telah dilakukan :

1) GENTAYANGAN (*Gerakan Tanam Sayuran dan Buah di Pekarangan*)

Adapun tujuan dari inovasi ini adalah :

- a. Meningkatkan ketersediaan sayur dan buah segar sebagai sumber zat gizi keluarga di pekarangan;
- b. Mempermudah akses terhadap sumber pangan bergizi terutama sayur dan buah segar;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penganeekaragaman konsumsi pangan dalam pemenuhan gizi keluarga.

Manfaat dari inovasi ini adalah :

- a. Keluarga dapat mengatur kebutuhan sumber gizi keluarga dengan menanam jenis sayuran dan buah yang beragam;
- b. Keluarga dapat memenuhi kebutuhan gizi dari pekarangan sendiri;
- c. Kemudahan dalam memperoleh sumber pangan bergizi dan aman bagi keluarga.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan inovasi ini adalah: pekarangan keluarga banyak dimanfaatkan untuk menanam sayuran dan buah, sumber pangan sehat bagi keluarga yang sangat mudah didapat dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

2) SeRumPun (*Satu Rumah Satu Pohon Nangka*)

Program Inovasi SeRumPuN (Satu Rumah Satu Pohon Nangka) ini merupakan suatu upaya agar masyarakat memiliki ketekunan, Usaha, Keyakinan, Ulet, dan Lincih dalam mengolah dan memanfaatkan lahan pekarangan

sehingga menjadi produktif, sehingga dapat mengatasi kerentanan pangan dan gizi dalam rumah tangga. Dengan Program Inovasi SeRumPuN (Satu Rumah Satu Pohon Nangka) diharapkan dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan terutama di Desa rentan rawan pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

3) ERAGRO (*Ecer Rasa Grosir*)

Adapun tujuan dan manfaat dari inovasi ini antara lain :

- a. Memberdayakan Pasar Mitra Tani Kabupaten dan Toko Mitra Tani di Kecamatan Bengkulu Selatan;
- b. Menyalurkan bahan pangan murah dengan kegiatan gelar pasar murah di tiap Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- c. Memperpendek rantai distribusi pangan dari wilayah produsen ke wilayah konsumen;
- d. Memberikan kemudahan aksesibilitas pangan kepada konsumen/masyarakat;
- e. Mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis di tingkat produsen dan konsumen.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Laporan kinerja ini disusun bertujuan mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, atas keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam menjalankan tupoksi, dan juga merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023. Dari hasil analisis kinerja Dinas Ketahanan pangan Tahun 2023, Kinerja dan Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 **Baik** dengan realisasi capaian kinerja terhadap Renstra SKPD sebesar 94,69% dan Realisasi Anggaran sebesar 93,01%. Namun demikian, pada beberapa aspek perlu dilakukan pembenahan lebih lanjut agar pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai secara maksimal. Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan melalui rencana strategis yang telah ditetapkan dengan tingkat capaiannya dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Terlaksananya penanganan desa rentan rawan pangan melalui kegiatan pembagian bibit nangka mini sebanyak 532 batang. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September 2023 di 6 Desa antara lain: Ds. Lubuk Ladung Kec. Kedurang Ilir, Ds. Sukarami Kec. Kedurang Ilir, Ds. Karang Caya Kec. Kedurang Ilir, Ds. Sukananti Kec. Kedurang, Ds. Nanti Agung Kec. Kedurang, Ds. Rantau Sialang Kec. Kedurang.
2. Berdasarkan Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan Bengkulu Selatan tahun 2023 (data 2022) total energy perkapita perhari sebesar 3.311 kkal/kap/hari, ketersediaan protein sebesar 110,66 gram/kap/hari, dengan tingkat ketersediaan energy tahun 2023 adalah 137,95% dan tingkat ketersediaan protein sebesar 175,65%. Sehingga didapatkan Skor PPH Ketersediaan sebesar 93,16 dengan Angka Kecukupan Energi

sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein sebesar 63 gram/kap/hari.

3. Data Identifikasi pangan lokal di tiap kecamatan pada tahun 2023 antara lain : di Kecamatan Manna jumlah produksi/thn terbesar adalah ubi kayu sebesar 200 ton dengan luas lahan 15 Ha, di Kecamatan Kota Manna dan Pasar Manna jumlah produksi/thn terbesar adalah pisang sebesar 40 ton dengan luas lahan 7,5 Ha, di Kecamatan Kedurang jumlah produksi/thn terbesar adalah ubi kayu yaitu sebesar 60 ton dengan luas lahan 4 Ha, di Kecamatan Bunga Mas jumlah produksi/thn terbesar adalah jagung yaitu sebesar 600 ton dengan luas lahan 672 Ha, di Kecamatan Kedurang Ilir jumlah produksi/thn terbesar adalah Jagung Manis yaitu sebesar 2 ton dengan luas lahan 2 Ha, di Kecamatan Seginim jumlah produksi/thn terbesar adalah pisang sebesar 73 ton dengan luas lahan 9 Ha, di Kecamatan Air Nipis jumlah produksi/thn terbesar yaitu ubi kayu sebesar 312 ton dengan luas lahan 12 Ha, di Kecamatan Pino jumlah produksi/thn terbesar adalah pisang sebesar 86 ton dengan luas lahan 43 Ha, di Kecamatan Pino Raya jumlah produksi/thn terbesar adalah ubi kayu yaitu sebesar 10 ton dengan luas lahan sebanyak 200 Ha, di Kecamatan Ulu Manna jumlah produksi/thn terbesar adalah jagung yaitu sebesar 618 ton dengan luas lahan 273 Ha.
4. Dinas Ketahanan Pangan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan pekarangan melalui pembagian bibit untuk kegiatan P2KP pada Bulan Mei s/d Desember Tahun 2023. Bibit tersebut disalurkan di 7 desa yaitu (1) KWT Makmur Sehati Ds. Pagar Gading Kec. Pino Raya, (2) KWT Melati Ds. Pagar Banyu Kec. Kedurang Ilir, (3) KWT Cempaka Putih Ds. Air Sulau Kec. Kedurang Ilir, (4) KWT Mawar Merah Ds. Padang Burnai Kec. Bunga Mas, (5) KWT Anggrek Ds. Tanjung Eran Kec. Pino, (6) KWT Harapan Kita

Ds. Padang Mumpo Kec. Pino, serta (7) KWT Taman Indah Kelurahan Gunung Ayu Kec. Kota Manna.

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan pembinaan kelompok penerima manfaat kegiatan Urban Farming (Pertanian Perkotaan) pada bulan September s/d Desember 2023 di 2 Kelurahan yaitu KWT Tomat Kelurahan Padang Kapuk Kec. Kota Manna dan KWT Harapan Maju Kelurahan Gunung Mesir Kec. Pasar Manna.

5. Berdasarkan data analisa konsumsi pangan Tahun 2023, total konsumsi energy aktual sebesar 2.074 kkal/kap/hr, dengan Angka Kecukupan Energi sebesar 2.100 kkal/kap/hari dan didapatkan Skor PPH konsumsi sebesar 89,2.
6. Pengawasan keamanan pangan segar dilakukan dengan menggunakan rapid test kit untuk mengetahui kandungan pestisida dan formalin pada sample yang diuji. Pengawasan tersebut dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada bulan April di Pasar Kutau Kec. Kota Manna, pada bulan Agustus di Pasar Ampera Kec. Pasar Manna, pada bulan Oktober di Pasar Kayu Kunyit Kec. Manna. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dilaksanakan terhadap produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan organik, baik di tingkat budidaya, penerapan maupun yang beredar di pasar. Pada pengawasan 1, jenis sample yang digunakan seperti Cabe, Tomat, Brokoli, Anggur dan Mangga Indramayu. Hasil pengujian pada pengawasan ke-1, didapatkan hasil bahwa anggur tidak aman dikonsumsi karena positif mengandung formalin. Pada pengawasan ke-2, jenis sample yang digunakan seperti Cabe, Brokoli, Bunga Kol, Tomat, Bawang Daun, Anggur dan Pir. Hasil pengujian pada pengawasan ke-2, didapatkan hasil bahwa Cabe asal Seginim, Bunga Kol asal Curup, dan Tomat asal Pagaralam tidak aman dikonsumsi karena positif

mengandung pestisida. Pada pengawasan ke-3, jenis sample yang digunakan seperti Kubis, Mangga Indramayu, Pir, Cabe, dan Tomat. Hasil pengujian pada pengawasan ke-3, didapatkan hasil bahwa Cabe Seginim tidak aman dikonsumsi karena positif mengandung pestisida.

7. Pada tahun 2023 telah dilakukan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu beras sebanyak 5.000 kg melalui alokasi dana APBD Kabupaten Bengkulu Selatan. Stock awal cadangan pangan pemerintah daerah diawal tahun 2023 yaitu 6.178,07 kg. Selama tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan cadangan pangan pemerintah (beras) sebanyak 5.017,6 kg, sehingga stock akhir cadangan pangan pemerintah daerah (beras) tahun 2023 yaitu sebanyak 6.160,47 kg.
8. Untuk kegiatan pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia, dilakukan sosialisasi penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) di 4 gapoktan yaitu Gapoktan Empat Serangkai Ds. Melao Kec. Manna, Gapoktan Tiga Serangkai Ds. Pajar Bulan Kec. Kedurang, Gapoktan Sejahtera Ds. Beringin Datar Kec. Pino dan Gapoktan Bukit Barisan Ds. Sukarami Kec. Air Nipis. Selanjutnya dilakukan pembinaan dan pendampingan LDPM dan TTI di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada Tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan pengendalian inflasi melalui pengadaan cadangan pangan (beras) sebanyak 35 ton. Beras cadangan pangan tersebut akan dibagikan di tahun 2024, dan sisanya akan menjadi stok cadangan pangan pemerintah.
9. Pengamatan harga yang diamati yaitu harga produsen dan harga pedagang (pedagang grosir dan pedagang eceran). Pengamatan diamati dan diupdate setiap hari mulai bulan

Januari s/d Desember 2023. Komoditas pemantauan harga pangan tersebut antara lain : Beras premium, Beras medium (kg), Kedelai biji kering (impor) (kg), Bawang merah (kg), Bawang putih bonggol (kg), Cabe merah keriting (kg), Cabe rawit merah (kg), Daging ayam ras (kg), Daging sapi murni (kg), Telur ayam ras (kg), Gula konsumsi (kg), Minyak goreng kemasan (kg), Tepung terigu (curah) (kg), Ikan tongkol (kg), Garam halus beryodium (kg), Tepung terigu kemasan (kg).

2. Rekomendasi

Meskipun capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sudah termasuk dalam kategori Baik, namun dari hasil analisis capaian kinerja masih terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan/mempertahankan kinerja yang telah didapatkan. Beberapa upaya yang harus dilakukan antara lain :

1. Komitmen bersama seluruh ASN Dinas Ketahanan Pangan akan pentingnya penerapan SAKIP agar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan efektif dan efisiensi;
2. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada;
3. Peningkatan SDM melalui diklat/bimtek sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dalam mencapai misi organisasi.